

TNI AL Kirim KRI Spica-934 untuk Latihan Bersama Australia di Laut Timor

JAKARTA (IM) - TNI Angkatan Laut (AL) mengirimkan KRI Spica-934 untuk menggelar latihan bersama (latma) Survei Hidrografi Terkoordinasi atau Co-ordinated Hydrographic Survey Exercise (CHSE) dengan Royal Australian Navy (Angkatan Laut Australia).

KRI Spica-934 yang dikomandani Letkol Laut (P) Deirus Rizki Khair itu telah diberangkatkan dari Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat (29/9).

Pemberangkatan dipimpin langsung oleh Komandan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Danpushidrosal) Laksdya Nurhidayat.

KRI Spica-934 bersama Angkatan Laut Australia akan menggelar survei hidrografi selama satu bulan di perairan Laut Timor, mulai 29

September sampai dengan 25 Oktober 2023.

"Kegiatan latma Co-ordinated Hydrographic Survey Exercise (CHSE) Indonesia-Australia 2023 ini merupakan salah satu bentuk kerja sama antara Pushidrosal TNI AL dan Australian Hydrographic Office (AHO) guna mencapai solusi bersama, terutama terkait persoalan hidrografi dan pemetaan laut di wilayah perbatasan maritim kedua negara," kata Nurhidayat dalam siaran pers Dispenal, Senin (2/10).

Angkatan Laut kedua negara bakal berlatih dengan kapal survei masing-masing di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia atau Australia dengan area yang sudah ditentukan sebelumnya. Latma secara umum meliputi kegiatan berupa survei hidrografi, oseanografi, meteorologi, dan geografi maritim. ● mei

Istri Hasbi Hasan Kembali Diperiksa Penyidik KPK Terkait Suap di MA

JAKARTA (IM) - Ida Nurida, istri Sekretaris Non-aktif MA, Hasbi Hasan, kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Ida merupakan dosen UIN Banten diperiksa pada Sini (2/10) di gedung Merah Putih KPK.

Pada pemanggilan sebelumnya, Ida Nurida, tidak memenuhi panggilan KPK pada Senin (25/9). Sedianya Ida diperiksa sebagai saksi atas kasus hukum terhadap suaminya. Selain Ida, saksi bernama Evi Nuvati juga tidak menghadiri panggilan KPK.

"Kedua saksi tidak hadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (26/9).

Sebagai informasi, Ida

Nursida sebelumnya sempat memenuhi panggilan KPK pada 24 Agustus 2023 silam. Namun, Ida menolak untuk memberikan keterangan.

KPK telah menetapkan Sekretaris MA non aktif Hasbi Hasan dan mantan Komisaris Independen Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

Dalam perkara ini, Dadan diduga telah menerima uang Rp11,2 miliar dari Debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Itindana, Heryanto Tanaka dan pengacaranya, Theodorus Yosep Parera. Sebagian uang itu kemudian diserahkan oleh Dadan ke Hasbi Hasan. Hasbi diduga menerima jatah atau bagian sebesar Rp3 miliar dari total Rp11,2 miliar yang diterima Dadan. ● han

Ngaku Masih Netral soal Capres, PSI Berencana Temui Megawati

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie menegaskan, partainya hingga kini masih belum menentukan pilihan calon presiden (capres) yang akan didukung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Masih netral," kata Grace saat diminta konfirmasi, Senin (2/10).

Seperti diketahui, baru-baru ini Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep diajak berkomunikasi dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. Komunikasi itu dilakukan agar PSI ikut gerbong PDI-P mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Soal pertemuan itu, menurut Grace, PSI justru akan mengirimkan surat kepada PDI-P untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Sebagai junior di dunia politik, ia menilai, PSI yang justru harus sowan ke Megawati yang lebih senior.

"Kami segera buat surat audiensi dengan Ketum PDI-P. Silaturahmi. Yang muda silaturahmi ke kakak-kakak senior," ucapnya.

Meski begitu, Grace masih enggan membocorkan apa saja hal yang akan dibahas saat bertemu Megawati kelak.

"Silaturahmi saja dulu. Selebihnya nanti mengalir

saja. Ya tunggu habis surat dikirim kan nunggu balasan dari yang bersangkutan," kata Grace.

Sebelumnya, Puan mengajak Kaesang untuk bertemu. Hal ini perlu dilakukan sebelum Kaesang bertemu dengan Megawati.

"Ya ayo, Mas Kaesang, ketemu Mbak Puan dulu. Ayo ketemu Mbak Puan," kata Puan saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (30/9) lalu.

Puan mengaku bahwa dirinya menunggu keinginan Kaesang untuk bertemu.

"Yuk, sudah ditunggu nih sama Mbak Puan, Mas Kaesang," kata Puan.

Ketua DPR RI ini kemudian ditanya mengapa seolah getol mengajak Kaesang bertemu. Menurut dia, hal ini karena dia berharap Kaesang bisa bergabung dalam koalisi PDI-P pada Pemilu 2024.

"Tapi kan semua juga punya pertimbangan tertentu. Sehingga nanti kalau kita bilang enggak mau ngajak Mas Kaesang, dibilangnya PDI Perjuangan enggak mau ngajak. Sekarang kita ngajak ditanya lagi," imbuh Puan.

Puan menegaskan bahwa dalam ajakan itu, PDI-P tidak memberikan apa pun tawaran pada Kaesang.

"Ini bukan politik jual beli. Ini bagaimana menyamakan visi dan misi untuk membangun bangsa ber-negara," ujar Puan. ● han

PENGUMUMAN
RENCANA PENGAMBILALIHAN
PT SUPER CEPAT TEKNOLOGI INDONESIA

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan kepada semua pihak dan karyawan bahwa rencana pengambilalihan atas seluruh saham saham milik PT SUPER CEPAT TEKNOLOGI INDONESIA ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mengakibatkan perubahan seluruh pemegang saham pada Perseroan.

Bagi Kreditor atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, dapat mengajukan keberatannya secara tertulis mengenai rencana akuisisi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini kepada:

PT SUPER CEPAT TEKNOLOGI INDONESIA
Plaza Kaha Lt 4-402
Jl. Abdullah Syafiq No 20 A,
Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan
Telp: 021-22908096
Jakarta, 03 Oktober 2023
Direksi
PT SUPER CEPAT TEKNOLOGI INDONESIA

PENGUMUMAN
Bakwa PT. KOPI SELAMAT PAGI berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut PERSEROAN), suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan bahwa: PT. KOPI SELAMAT PAGI tersebut akan melakukan pelepasan 100% saham dalam perseroan (akuisisi) kepada pihak ketiga.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditor atau pihak ketiga lainnya yang ada kaitannya dengan Perseroan tersebut, dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat:

PT. KOPI SELAMAT PAGI
Jalan Mandala Utara No. 29 C
Grogol Petamburan, Tomang
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Pengumuman ini dimuat dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 03 Oktober 2023
Direksi,
td
(VAN KENNY TAMARA)

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



PELANTIKAN PJ GUBERNUR SUMSEL DAN KALTIM

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah) didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas (ketiga kiri) berfoto bersama Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik (kiri), Gubernur Kaltim periode 2018-2023 Isran Noor (kedua kiri), Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni (kedua kanan), Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya periode 2018-2023 (ketiga kanan), dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2018-2023 Hadi Mulyadi (kanan) usai upacara pelantikan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (2/10). Agus menggantikan Gubernur Sumsel sebelumnya Herman Deru dan Akmal menggantikan Gubernur Kaltim sebelumnya Isran Noor untuk setahun mendatang.

Luhut: Banyak Pihak yang Pesimistis Kereta Cepat Whoosh Bisa Selesai

Kereta Cepat Whoosh banyak memberi manfaat untuk Indonesia, di antaranya membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lokal.

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku, ada banyak kendala yang dihadapi selama pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Beberapa di antaranya soal koordinasi pembangunan yang belum baik dan kesulitan pendanaan.

"Terus terang sejak kami menerima penugasan dari Bapak Presiden, untuk melanjutkan pembangunan proyek kereta api cepat pada akhir tahun 2019, ada banyak

masalah dan kendala yang kami temukan," ujar Luhut saat peresmian Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur, Senin (2/10).

"Dimulai dari masalah klasik mengenai pembebasan lahan, koordinasi yang belum baik, hingga kesulitan pendanaan yang dihadapi akibat Covid-19. Tentu tidak heran banyak pihak yang pesimistis proyek ini akan bisa diselesaikan," kata Luhut.

Meski demikian, Presiden Joko Widodo tetap memberikan semangat untuk menye-

lesaikan proyek tersebut. Dengan begitu, pemerintah bisa membuktikan proyek pembangunan kereta cepat bernama Whoosh ini bisa selesai dan dapat beroperasi.

Keberhasilan itu tidak lepas dari kerja sama yang baik dari seluruh pihak.

"Baik pemerintah pusat, daerah, BUMN, masyarakat, swasta, dan Pemerintah China dan seluruh perusahaannya yang terlibat. Dan banyak lagi elemen-elemen yang terlibat dalam proyek ini," katanya.

Luhut menjelaskan, melalui Kereta Cepat Whoosh Pemerintah Indonesia membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lokal. Selain itu, juga menciptakan pertumbuhan ekonomi untuk daerah-daerah

yang dilintasi oleh jalur kereta api cepat.

"Dan terjadinya teknologi transfer yang mutakhir utamanya di bidang konstruksi dan modernisasi sistem perkeretaapian," kata Luhut.

"Ke depannya kami berharap Kereta Api Cepat Jakarta Bandung akan mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi umum dalam rangka mengurangi emisi karbon dari sektor kendaraan pribadi," katanya.

Presiden Jokowi telah meresmikan Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Kereta Cepat Halim, Senin (2/10). Presiden pun menjelaskan arti nama "Whoosh" untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang baru diresmikan itu.

Menurut Presiden, nama

"whoosh" terinspirasi dari suara yang timbul saat KCJB sedang melintas.

"Kereta cepat ini kita namakan WHOOSH, W, H, OOSH, dibaca wuss. Ini diinspirasi dari suara yang melintas dari kereta berkecepatan tinggi ini," ujar Jokowi.

Selain itu, kata Jokowi, Whoosh juga merupakan singkatan dari "waktu hemat operasi optimal sistem hebat". Presiden mengungkapkan, Kereta Cepat Whoosh merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara dengan kecepatan 350 kilometer per jam.

Kereta cepat ini menandai modernisasi transportasi massal Indonesia yang disebut Jokowi lebih efisien yang ramah lingkungan. ● mei

TERKAIT KORUPSI DI KEMANTAN

Dua Mantan Pegawai KPK Diperiksa, Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang

JAKARTA (IM) - Penyidik KPK memanggil tiga orang saksi dari kalangan pengacara untuk menjadi saksi kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Sebagai bagian pengumpulan alat bukti oleh Tim Penyidik KPK, pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi sudah mulai teragenda," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Senin (2/10).

Ketiga saksi tersebut adalah Febri Diansyah, Rasamala Aritonang dan Donal Fariz, diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Ketiganya diperiksa sebagai pengacara.

Seperti diketahui, Febri dan Rasamala merupakan mantan pegawai KPK. Dima-

na, Febri merupakan mantan juru bicara dan Rasamala sebagai pegawai di Biro Hukum. Sedangkan untuk Donal, merupakan mantan peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW).

"Pemanggilan para saksi ini tentu sebagai kebutuhan proses penyidikan yang sedang KPK selesaikan," ujar Ali.

Sementara Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan mengaku belum menerima surat panggilan dari Lembaga Anti-rasuah tersebut. Febri mengaku, mengetahui adanya pemanggilan tersebut dari rekan-rekan media melalui WhatsApp.

"Meskipun sampai hari ini belum ada surat panggilan yang kami terima, tapi Kami akan mendatangangi KPK, seka-

ligus untuk klarifikasi terkait pemanggilan tersebut," kata Febri kepada wartawan, Senin (2/10).

Dalam kesempatan tersebut, Febri juga akan meminta keterangan KPK perihal bagaimana surat pemanggilan untuk dirinya dikirim dan status pengacara yang dilabelkan pada dirinya dalam keterangan pemeriksaan saksi.

Sebelumnya, KPK dikabarkan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait sejumlah kasus dugaan korupsi di Kementan. Ketiga orang tersebut yakni, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Kasdi Subagyo, serta Direktur Alat Mesin Pertanian, Muhammad Hatta.

"Ya sudah jadi tersangka," kata sumber saat dikonfirmasi soal penetapan tersangka ketiganya, Jumat (29/9) lalu.

Sementara itu, Ali Fikri menjawab diplomatis saat dikonfirmasi soal penetapan tersangka tersebut. Ali menanggapi bahwa pihaknya saat ini masih mengumpulkan alat bukti untuk menguatkan kasus yang sedang disidik.

Pengumpulan alat bukti tersebut dilakukan salah satunya lewat proses pengeledahan. Salah satu lokasi yang

digeledah yakni rumah dinas Syahrul Yasin Limpo di Jalan Widya Chandra V, Nomor 28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Yang pasti pengumpulan bukti terus KPK lakukan. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, KPK hanya akan menyampaikan seluruh proses penanganan perkara secara utuh pada saatnya setelah semua proses penyidikan cukup dilakukan," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi terpisah.

● han

PENGUMUMAN

Diumumkan kepada khalayak ramai, bahwa telah hilang 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Jl. Cakung Cilincing RT.009 RW.008 Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur atas nama Rudy Herman S seluas 4855m2, yaitu:

1. SHM No. 03832 Gamber Situasi 00695/2017 Luas Tanah 4855m2. Barang siapa mengetahui atau menemukan keberadaan 1(satu) buah buku Sertifikat tersebut diatas, agar dapat menghubungi: - Bapak Rudy sebagai pemilik (08829357275)

Demikian Pengumuman ini berlaku sampai dengan 1(satu) bulan lamanya, terhitung sejak tanggal pengumuman.

Jakarta, 02 Oktober 2023
td
Rudy Herman S

PENAWARAN UMUM REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

PT Sylaendra Capital, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi bermaksud melakukan penawaran umum REKSA DANA PT SYAILENDRA CAPITAL ("REKSA DANA") dengan rincian sebagai berikut:

1. REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TOTAL RETURN yang telah memperoleh surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-2496/PM.02/2023 tanggal 4 September 2023.

Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SYAILENDRA PENDAPATAN TOTAL RETURN secara terus menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- i) SYAILENDRA PENDAPATAN TOTAL RETURN Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- ii) SYAILENDRA PENDAPATAN TOTAL RETURN Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA PENDAPATAN TOTAL RETURN mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA dapat diperoleh di Kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Elek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

SYAILENDRA Jakarta, 3 Oktober 2023
Manajer Investasi
PT SYAILENDRA CAPITAL
District 8, Treasury Tower, 39th Floor, Unit 39A
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (62-21) 2793 9900
Faksimili: (62-21) 2793 1199

"INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENGERINCINKAN KINERJA MASA DATANG. PT SYAILENDRA CAPITAL TERDAFTAR DAN DIAWASI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PENAWARAN PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI OTORITAS JASA KEUANGAN."



MK TOLAK UJI MATERI UU CIPTA KERJA

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Partai Buruh Said Iqbal (tengah) menyimak jalannya sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/10). Majelis Hakim MK menolak permohonan para pemohon untuk perkara nomor 40/PUU-XXI/2023 karena dinilai tidak beralasan menurut hukum.